

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ajину Stefano Da Costa
NPP. 29.1280

*Asdaf Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: ajinudacosta@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): The decent housing program is a district government program that is carried out with the aim of reducing poverty from the housing sector for the district of North Central Timor, East Nusa Tenggara Province. **Purpose:** to find out how the implementation of the livable housing program is in the North Central Timor district, East Nusa Tenggara province and to find out the causes of the non-optimal implementation of the implementation of the livable housing program in the North Central Timor district, East Nusa Tenggara province. **Method:** The research method used by the author in this study is a qualitative research method. The data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. **Result:** The results showed that the implementation of the decent housing program in poverty alleviation in the North Central Timor district was not optimal or its utilization was not yet optimal. This is due to or evidenced by the failure to achieve the target for the number of livable housing developments in the North Central Timor district. **Conclusion/suggestion:** The advice given by the author is that there is a need for close cooperation and supervision from the district government, namely the Public Housing Service for Settlement and Land Areas, sub-districts, villages or sub-districts to communities who are beneficiaries of livable housing assistance and third parties in this case building shops, so that in the implementation Inhabitable Houses program, the construction can be completed on time that has been determined and the provision of sanctions for the recipients of livable housing assistance who do not complete the construction work on time that has been determined.

Keywords: *Liveable Houses, Poverty*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program rumah layak huni merupakan program pemerintah kabupaten yang dilakukan dengan tujuan agar menurunkan angka kemiskinan dari sektor papan bagi masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk Mengetahui penyebab belum optimalnya implementasi dalam pelaksanaan program rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi program rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Timor Tengah Utara belum Optimal atau masih belum maksimal pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan

atau dibuktikan dengan tidak tercapainya Target jumlah Pembangunan rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara. **Kesimpulan dan Saran:** Saran yang diberikan penulis agar perlu adanya kerjasama dan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah kabupaten yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, kecamatan, desa atau kelurahan kepada masyarakat penerima manfaat bantuan rumah layak huni serta pihak ketiga dalam hal ini toko bangunan, agar dalam Implementasi program Rumah Layak Huni, Pembangunannya bisa selesai tepat pada waktu yang sudah ditentukan Serta adanya pemberian Sanksi bagi penerima bantuan rumah layak huni yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: *Rumah Layak Huni, Kemiskinan.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak untuk dihuni tidak terlepas dari perhatian dunia internasional maupun negara-negara baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang, Indonesia salah satunya yang memberikan kewenangan kepada daerah, termasuk mensejahterakan warganya dalam bentuk program rumah layak huni. Terdapat empat kriteria suatu rumah dikatakan sebagai rumah yang layak untuk dihuni berdasarkan kriteria yang ditetapkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yang termasuk dalam Kriteria tersebut meliputi, luas bangunan rumah tempat tinggal paling kecil 7,2 M² perkapita, mempunyai akses untuk penyediaan kebutuhan air minum yang layak untuk dikonsumsi, mempunyai akses terhadap sanitasi yang Layak serta mempunyai ketahanan bangunan yang memadai termasuk bahan Kontruksinya. Maka dengan kriteria ini setelah didata oleh Badan Pusat Statistik ditahun 2019 kondisi perumahan diindonesia sebanyak 4,30 % yang masih menempati hunian yang tidak layak. Dengan melihat kondisi ini maka Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dari tingkat nasional hingga ke pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperhatikan dalam penyediaan rumah layak untuk dihuni dan terjangkau untuk masyarakat, aman dan sehat. Kondisi Rumah tidak layak huni ini tentu menarik perhatian dari banyak pihak untuk berperan serta untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni,tidak hanya menjadi perhatian dari dalam negeri akan tetapi juga mengundang perhatian dari dunia internasional.Tahun 2019 word bank mengkalim bahwa rumah yang layak untuk dihuni masuk dalam indikator penting untuk Mencegah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terpuruk dalam kemiskinan di Indonesia. Akses rumah yang layak untuk dihuni bagi kaum Masyarakat Berpenghasilan rendah masih sedikit dikarenakan biaya untuk memiliki rumah yang dari waktu ke waktu semakin bertambah kemahalannya.Bank dunia pun memberikan bantuan dana melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam Implementasinya word bank tetap mengikuti peraturan pemberian bantuan untuk renovasi rumah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyaluran dana dari Bank dunia ini dimuat dalam kerjasama *National Affordable Housing Program* (NAHP). Kerjasama yang dilakukan anatar Bank dunia dengan Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dana yang disalurkan oleh Bank Dunia dalam kerjasama ini senilai 5.450 juta dollar amerika, dengan jumlah biaya bantuan sebesar itu dimaksudkan untuk mendukung implementasi program pemerintah dalam pengentasan rumah tidak layak huni.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Badan Di Indonesia,Pemerintah juga mempunyai dukungan untuk penyediaan rumah layak huni bagi warga negara dan sudah menjadi kewajiban dari Negara.Hal ini tercantum pada Pasal 28H ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimana menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal,dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan kemudian ditegaskan lagi pada undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman menjelaskan bahwa rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Oleh sebab itu setiap warga negara memiliki hak untuk dapat tinggal dan mendapat lingkungan yang aman dan sehat. Undang - Undang yang dikemukakan diatas menekankan peran penting dari pemerintah akan penyediaan perumahan yang layak untuk dihuni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menindaklanjuti kondisi permasalahan diatas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upayanya untuk pengentasan rumah tidak layak huni menjalankan program sejuta rumah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui direktorat jenderal perumahan mengumumkan capaian pembangunan rumah untuk masyarakat yang ada didalam program sejuta rumah per 11 Mei 2020 mencapai 215.662 unit. Di provinsi Nusa Tenggara Timur Khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara, perhatian nyata pemerintah terhadap pemberantasan rumah tidak layak huni di kalangan masyarakat kurang mampu, dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program pemberantasan rumah tidak layak huni oleh Bupati Timor Tengah Utara. Program pemberantasan rumah tidak layak huni ini dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun serta menargetkan tercapainya 30.000 buah rumah untuk masyarakat yang kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal hal ini ditunjukkan dengan tidak tercapainya target pembangunan rumah untuk masyarakat yang kurang mampu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Berdasarkan judul penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang Evaluasi sementara pada penelitian kali ini membahas mengenai Implementasi. Berikutnya untuk lokasi penelitian terdapat perbedaan yang dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Belitung dan kota samarinda dan untuk persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari objek penelitian ,seperti pada kedua penelitian terdahulu yang di cantumkan,yaitu : Evaluasi program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung (Bambang Winarno (2018)) dan Evaluasi kebijakan pembangunan rumah layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda (Ibnu Abas (2015)) yang pada dasarnya mengarah pada kekurangan dan kelemahan dalam program pemerintah.berbeda dengan penelitian kali ini dimana peneliti mengarah pada Implementasi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara.Oleh karena itu,penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya,yaitu sebagai pembanding dan sumber inspirasi untuk meminimalisir kegagalan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukannya yaitu Impelemntasi Program rumah layaj huni dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten timor tengah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan menggunakan Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian saat ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Menurut Moleong(2016:6) menyatakan bahwa, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,persepsi,motivasi tindakan,dll,secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan kegiatan, tahapan atau cara dalam pelaksanaan penelitian yang diawali dari perumusan masalah hingga kesimpulan. secara umum pendekatan penelitian terdapat 3 macam, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan campuran (*mixed methods*).

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan penelitian kualitatif, menurut Moleong (2004:05), yaitu:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan mudah menyesuaikan diri dengan banyak pengalaman berpengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sehingga dengan pertimbangan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti akan berhadapan langsung guna meneliti implementasi program rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Komunikasi

Komunikasi, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan Publik. Menurut Edward III (Agustino (2014))Mengemukakan Bahwa “ Implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.” Komunikasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kunci dalam suatu proses Implementasi, karena dengan komunikasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan satu hal dengan hal-hal lain sehingga terciptanya kesepakatan. Terdapat tiga indikator dari dimensi komunikasi, yakni:

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi indikator Komunikasi, yaitu mengenai proses penyaluran informasi atau sosialisasi informasi tentang pelaksanaan program pemerintah kepada pegawai dinas Perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan serta kepada masyarakat. Dalam hal ini, sebelum aparat atau pegawai melakukan pekerjaan, maka seharusnya mengetahui terlebih dahulu apa yang nantinya dikerjakan apakah sudah sesuai instruksi atau belum. Dalam pengimplementasian program rumah layak huni oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Timor Tengah Utara sangat dibutuhkannya komunikasi yang baik, Komunikasi inilah yang menjembatani antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

b. Kejelasan

Dalam pengimplementasian program rumah layak huni ini tentunya

mempunyai suatu kejelasan agar pada pelaksanaannya tidak menimbulkan suatu keraguan dan kerancuan. Dalam pelaksanaannya juga mempunyai dasarnya tersendiri sehingga mempunyai fondasi yang kuat dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Konsisten

Adapun faktor selanjutnya yang mempengaruhi komunikasi yaitu konsistensi, sehingga dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus dilakukan secara konsisten. Konsisten itu sendiri mempunyai makna pendirian yang kuat atau kokoh agar dalam pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh apapun. Dikarenakan apabila instruksi yang disampaikan sudah jelas namun dalam pelaksanaannya tidak konsisten maka proses implementasi yang dilakukan tidak akan berjalan sesuai rencana atau tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam mensukseskan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya juga merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu implementasi kebijakan karena didalam sumber daya terkandung hal-hal penting demi terwujudnya suatu tujuan dari proses implementasi tersebut. Dengan adanya Sumber daya maka, dapat dipastikan tujuan-tujuan dari suatu Proses implementasi akan berjalan dengan lancar asalkan sumber daya tersebut dimanfaatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tanpa adanya sumberdaya maka suatu implementasi kebijakan tidak akan memperoleh suatu tujuan yang telah direncanakan atau kurang maksimal. Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Pengentasan kemiskinan dari Sektor Papan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Sumber daya merupakan bagian penting yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan program ini, Sumber daya yang dimaksudkan adalah semua pegawai yang mengambil bagian dalam pelaksanaan program rumah layak huni ini. Berikutnya, untuk mengetahui pengaruh sumber daya dalam implementasi kebijakan publik dapat digunakan indikator sebagai berikut:

a. Pegawai

Pegawai merupakan bagian penting dalam suatu unit kerja yang tidak dapat dipisahkan dalam menunjang suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan Pegawai merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Apabila bagian penting ini diabaikan atau tidak diperhatikan maka sudah pasti dapat berdampak besar dalam proses meraih keberhasilan implementasi kebijakan. Terkadang kegagalan dalam sebuah Implementasi dikarenakan pegawai yang kurang banyak dalam hal jumlah sedangkan beban pekerjaan yang banyak akan tetapi banyaknya jumlah pegawai tidak selamanya berdampak positif apabila kurang ahli atau profesional dibidangnya. Sehingga target yang dicita-citakan akan semakin susah untuk diraih semata-mata karena pegawai yang kurang berkompeten tadi.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Fasilitas mempunyai kedudukan sebagai penunjang dari proses implementasi dikarenakan apabila sumber daya manusia telah mempunyai

kemampuan yang memadai tapi tidak di dukung dengan fasilitas yang memadai, maka suatu implementasi kebijakan yang diharapkan dapat berhasil akan berpotensi mendapatkan masalah atau hambatan

c. Informasi

Informasi juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pelaksanaan suatu kebijakan. Informasi terdiri dari dua bentuk, yang pertama informasi tentang bagaimana pemahaman akan kebijakan itu sendiri serta cara melaksanakan suatu kebijakan dan yang kedua mengenai kepatuhan para pegawai atau staf pelaksana akan aturan yang telah ditetapkan. Informasi ini untuk bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman pegawai mengenai pelaksanaan program rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara.

3. Disposisi

Faktor yang tak kalah penting juga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik yaitu disposisi. Karena apabila pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat tercapai secara efektif, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui hal apa yang akan dilakukan akan tetapi harus bisa memiliki kemampuan dalam melaksanakannya. Dalam implemmentasi program rumah layak huni komitmen para pegawai dalam bekerja sangat diharapkan.

a. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian membawa pengaruh dalam proses implementasi suatu kebijakan atau program. Dalam Proses implementasi kebijakan, susunan Kepegawaian juga ikut dipertimbangkan dengan baik disamping mempertimbangkan faktor sumber daya, komunikasi serta struktur biriorasi. Dalam Implementasi program rumah layak huni di Kabupaten Timor Tengah Utara tentunya memiliki susunan kepegawaian guna memberikan perintah serta memiliki jalur dalam berkoordinasi jika sehingga mampu memberikan kejelasan bahwa kebijakan yang pemerintah buat telah terlaksana dengan baik dan mampu untuk dilaporkan secara administrasi atau dipertanggungjawabkan

b. Insentif

Insentif adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai pemicu semangat serta motivasi dalam bekerja. Insentif merupakan suatu sarana berupa materi yang diberikan dengan tujuan agar para pegawai lebih giat dalam melakukan pekerjaan dan memiliki keinginan untuk memperbaiki kinerjanya setiap harinya dalam bekerja. Adanya aspek penganggaran maka akan ada juga sumber penganggaran atau pembiayaanya yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks mengharuskan adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif dalam pelaksanaan kebijakan maka dapat menghambat implementasi suatu kebijakan. Sangat dibutuhkan struktur birokrasi yang baik untuk bisa mendukung kebijakan agar tercapai pada tujuan utama dari penerapan program rumah layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaan kebijakan dibutuhkan pembagian kerja serta petunjuk pelaksanaan yang baik dan proposional agar dapat membantu dalam proses implementasi kebijakan

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja harus dilakukan dengan baik dan proposional sehingga bisa membantu dalam proses implementasi kebijakan. Adapun pembagian kerja atau tugas dalam implementasi program rumah layak huni ini yang termuat dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Rumah rakyat Tidak Layak Huni,

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Implementasi program rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur perlu adanya kerja sama kerjasama dan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah kabupaten yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, kecamatan, desa atau kelurahan kepada masyarakat penerima manfaat bantuan rumah layak huni serta pihak ketiga dalam hal ini Toko Bangunan, agar dalam Implementasi program Rumah Layak Huni Pembangunannya bisa selesai tepat pada waktu yang sudah ditentukan, Serta adanya pemberian Sanksi bagi penerima bantuan rumah layak huni yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membuat Program pemerintah dimana Swadaya dari masyarakat lebih ringan dan menjadi program pemerintah untuk menanggung semua biaya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang berada di kelas paling bawah atau yang tidak mampu untuk swadaya, bisa merasakan bantuan pemerintah dan diharapkan bisa terlepas dari kemiskinan

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi program rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur dapat terlaksana secara baik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program rumah layak Huni Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dari sektor Papan di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Dikatakan sudah berjalan dengan baik karena dilihat dari adanya sosialisasi Program Pemerintah Tentang Bantuan Rumah Layak Huni, Kejelasan serta mampu dimengerti terkait Standar Operasional Prosedur oleh Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Timor Tengah Utara Namun masih belum Optimal atau masih belum maksimal pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan atau dibuktikan dengan tidak tercapainya Target jumlah Pembangunan rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara.
2. yang menjadi Penghambat Belum Optimalnya Implementasi Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Kurangnya Swadaya masyarakat penerima bantuan atau ketidakmampuan dalam swadaya untuk pembangunan rumah layak huni, Kurangnya Monitoring atau Pengawasan, Terlambatnya suplai bahan bangunan, Adanya Intervensi Politik, Masyarakat yang tidak mampu untuk Swadaya tidak bisa memperoleh bantuan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi penelitian Implementasi program rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur .

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi program rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2016.
Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ahadi, N. 2004. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: UirPress
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi 1*. Yogyakarta: UPP AMPYKN
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmawati, Y. I. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan*
<https://sarulmardianto.wordpress.com/2012/04/24/> diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 13.00
- Setyawan, D. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

2. Jurnal

- Abbas, I. 2015. *Evaluasi Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Paradigma. Vol 4 No 2
- Winarno, B. 2018. *Skema Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung*. Jurnal Pengembangan Kota. Vol 6

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni.

4. WEBSITE

Satria, Ase. 2016. *"Teori Kemiskinan (Pengertian / Definisi, Ciri-Ciri Dan Dimensi Kemiskinan Menurut Para Ahli)"*. Diakses pada tanggal 12 september 2021, dari <https://www.materibelajar.id/2016/04/teori-kemiskinan-pengertian-definisi.html>.

Badan Pusat Statistik. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi. Diakses pada 18 september 2021 dari, <https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html>



